

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**



**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>2</b>
<b>PENDAHULUAN</b>	<b>2</b>
Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	2
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD	4
<b>BAB II</b>	<b>5</b>
<b>IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD</b>	<b>5</b>
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	5
Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	5
<b>BAB III</b>	<b>6</b>
<b>PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD</b>	<b>6</b>
Rincian dari Penjelasan dari Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD	6
Pendapatan - LRA	6
Belanja	6
Pendapatan - LO	6
Beban	6
Aset	6
Kewajiban	6
Ekuitas Dana	6
Pengungkapan atas Pos-Pos yang timbul sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada SKPD	7
<b>BAB IV</b>	<b>8</b>
<b>PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD</b>	<b>8</b>
<b>BAB V</b>	<b>9</b>
<b>PENUTUP</b>	<b>9</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Temanggung yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai entitas akuntansi wajib menyajikan Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Neraca;
3. Laporan Operasional (LO);
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu maupun manajemen entitas pelaporan, karena Laporan Keuangan dapat dimungkinkan mengandung informasi yang mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman tersebut, dalam menyajikan Laporan Keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang berisi informasi dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Adapun manfaat bagi pemerintah adalah memberikan informasi yang lebih transparan mengenai biaya pemerintah dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi yang lebih komprehensif, tidak sekedar informasi yang berbasis kas. Sedangkan manfaat bagi masyarakat pengguna antara lain memungkinkan pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pengelola seluruh sumber daya oleh suatu entitas, menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas sehingga dapat menjadi dasar bagi pengambilan keputusan mengenai penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih tepat.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022, secara sistematis terdiri dari:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
BAB III	: PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
BAB IV	: PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD
BAB V	: PENUTUP

## BAB II

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

#### 2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung pada tahun anggaran 2022 melalui APBD Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp. **15.144 .306.470** yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 14.115.501.470 dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.028.805.000 yang dijabarkan dalam beberapa urusan program dan kegiatan. Realisasi belanja tersebut secara keseluruhan adalah sebesar Rp. 10.850.072.403 dan dapat dirinci pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Operasi	14.115.501.470	9.990.546.729	4.124.954.741	70,78
II	Belanja Modal	1.028.805.000	859.525.674	169.279.326	83,55

Berdasarkan Dokumen Perencanaan Anggaran DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung tahun 2022 total anggaran sejumlah Rp **15.144 .306.470** terbagi menjadi 9 program dan 39 sub kegiatan. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Rekening	Anggaran	Realisasi	%
1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	50000.000	47.444.175	94,89
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	23.780.600	95,12
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	56.475.000	45.821.605	81,14
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	131.022.000,00	2.853.175	2,18
5	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	21.709.100	86,84
6	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000,00	43.112.000	86,22
7	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	15.790.000,00	15.659.150,00	99,17
8	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	19.600.000,00	18.429.800,00	94,03

9	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegtan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	7.131.200,00	7.075.800,00	99,22
10	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.151.673.646,00	3.091.315.435,00	98,08
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	1.880.000,00	1.877.000,00	99,84
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.459.302,00	11.181.552,00	97,58
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.060.725,00	6.052.725,00	99,87
14	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.548.374,00	6.490.360,00	99,11
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.442.800,00	7.324.520,00	98,41
16	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.677.588,00	3.726.448,00	42,94
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.100.000,00	29.654.682,00	75,84
18	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.400.000,00	9.085.000,00	96,65
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	441.401.750,00	424.329.604,00	96,13



20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	14.963.000,00	99,75
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.600.000,00	35.534.000,00	94,51
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.800.000,00	16.643.230,00	88,53
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.400.000,00	9.294.750,00	98,88
24	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	31.739.000,00	29.015.110,00	91,42
25	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	38.288.000,00	37.996.700,00	99,24
26	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	33.960.000,00	31.066.080,00	91,48
27	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.253.628.000,00	778.433.204,00	62,09
28	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	30.000.000,00	12.737.250,00	42,46

29	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.387.200.000,00	1.386.300.000,00	99,94
30	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	67.177.000,00	41.775.000,00	62,19
31	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.831.035.000,00	933.899.600,00	51,00
32	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	35.400.010,00	20.000.000,00	56,50
33	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	17.110.300,00	12.968.250,00	75,79
34	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	314.700.000,00	122.339.250,00	38,87
35	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	280.000.000,00	264.250.000,00	94,38
36	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8.536.000,00	8.347.600,00	97,79
37	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	9.298.500,00	9.174.100,00	98,66

38	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.268.260.000,00	620.894.750,00	48,96
<b>JUMLAH</b>		10.501.915.515.00	8.103.910.590.00	

Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung dapat terlaksana.

## 2.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

1. Regulasi dan pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan terbit pada triwulan pertama sehingga implementasinya baru dimulai pada triwulan kedua.
2. Rendahnya pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga penyerapan anggaran pelayanan kasus juga tidak maksimal.

**BAB III**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

3.1. Rincian penjelasan dari masing - masing pos - pos Pelaporan Keuangan SKPD

3.1.1. Pendapatan - LRA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tidak memiliki pendapatan.

3.1.2. Belanja

Jumlah Realisasi belanja selama tahun 2022 adalah sebesar Rp. 10.850.072.403 dari anggaran sebesar Rp. 15.144.306.470. Rekapitan Jumlah belanja dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

No Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
5	BELANJA DAERAH	15.144.306.470	10.850.072.403	71,64
51	BELANJA OPERASI	14.115.501.470	9.990.546.729	70,78
5101	Belanja Pegawai	3.345.999.470	3.267.459.545	97,65
5102	Belanja barang dan Jasa	10.309.501.500	6.313.087.184	61,24
52	BELANJA MODAL	1.028.805.000	859.525.674	83,55
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	356.705.000	303.934.520	85,21
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	667.000.000	553.491.154	82,98
5205	Belanja Modal Aset Lainnya	5.100.000	2.100.000	58,82

Realisasi belanja daerah tahun 2022 terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 9.990.546.729 dan belanja modal sebesar Rp 859.525.674. Realisasi belanja operasi terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 3.267.459.545 dan belanja

barang dan jasa sebesar Rp 6.313.087.184. Realisasi belanja modal terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp 303.934.520, belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp 553.491.154, belanja modal aset lainnya sebesar Rp 2.100.000.

### 3.1.3. Pendapatan - LO

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp. 1.249.268.502 dari BKKBN yang terdiri dari obat sebesar Rp. 1.124.828.700 dan obat-obatan lainnya sebesar Rp. 124.439.802

### 3.1.4. Beban

Beban diakui pada saat ini :

1. Timbulnya kewajiban;
2. Terjadinya konsumsi aset;
3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Jumlah keseluruhan beban pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	Jumlah
8	BEBAN DAERAH	11.180.193.010,61
81	BEBAN OPERASI	11.180.193.010,61
8101	Beban Pegawai	3.269.609.059,00
8102	Beban Barang dan Jasa	6.332.364.495,00
8105	Beban Hibah	804.618.113,00
8108	Beban Penyusutan dan Amortisasi	773.601.343,61
	Jumlah Beban	11.180.193.010,61

### Beban Operasi

Jumlah Beban Operasi adalah sebesar Rp 11.180.193.010,61 yang merupakan penjumlahan beban pegawai dan beban barang/jasa dengan beban hibah dan beban penyusutan.

#### a. Beban Pegawai

Beban Pegawai DPPPAPPKB tahun 2022 adalah sebesar Rp 3.269.609.059,00

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa DPPAPPKB tahun 2022 adalah sebesar Rp 6.332.364.495,00

c. Beban Hibah

Beban Hibah DPPAPPKB tahun 2022 adalah sebesar Rp 804.618.113,00, yang terdiri beban hibah atas belanja hibah tahun 2022 sebesar Rp. 410.000.000,00 dan beban hibah persediaan ke faskes swasta sebesar Rp. 394.618.113,00.

**Surplus/Defisit dari operasi**

Surplus/defisit dari kegiatan operasional yaitu selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan. Karena tidak ada pendapatan maka dalam hal ini defisit operasi adalah sebesar - Rp 9.930.837.508,61

**A. ASET**

**ASET LANCAR**

Kode Rek	Nama Rekening	2022	2021
11	ASET LANCAR	627.786.938,70	763.398.964,70
1101	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
110103	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
1112	Persediaan	627.786.938,70	763.398.964,70
111201	Barang Pakai Habis	627.786.938,70	763.398.964,70

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0 dan pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp 0.

## 2. Persediaan

Jumlah persediaan barang per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 627.786.938,70 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rek	Nama Rekening	2022	2021
11120101 0012	Bahan lainnya	14.468.790	0
11120104 0001	Obat	402.280.888	514.170.614
11120104 0002	Obat-obatan Lainnya	206.630.460,70	247.976.850,70
11120103 0001	Alat Tulis Kantor	899.800	317.500
11120103 0002	Kertas dan Cover	2.419.500	739.000
11120103 0006	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.087.500	195.000
	Jumlah	627.786.938,70	763.398.964,70

## ASET TETAP

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 tersaji sebagai berikut :

Kode Rek	Nama Rekening	2022	2021
13	ASET TETAP	8.376.928.751,30	8.318.007.120,91
1301	Tanah	272.850.000,00	272.850.000,00
1302	Peralatan dan Mesin	7.610.649.499,00	7.695.267.611,00
1303	Gedung dan Bangunan	8.352.676.652,00	7.746.643.498,00
1304	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	8.218.100,00	8.218.100,00
1305	Aset Tetap Lainnya	66.500,00	66.500,00
1306	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	15.653.000,00
1307	Akumulasi Penyusutan	(7.867.531.999,70)	(7.420.691.588,09)

130701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.357.796.065,21)	(6.072.013.855,10)
130702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.503.180.334,49)	(1.342.187.132,99)
130703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(6.555.600,00)	(6.490.600)

### Ikhtisar mutasi selama Tahun 2022

Aset Tetap	Saldo Awal 2022	Tambah	Kurang	Saldo Akhir
Tanah	272.850.000,00	0	0	272.850.000,00
Peralatan & Mesin	7.695.267.611,00	308.764.520	393.382.632	7.610.649.499,00
Gedung & Bangunan	7.746.643.498,00	606.033.154	0	8.352.676.652,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.218.100,00	0	0	8.218.100,00
Aset Tetap Lainnya	66.500,00	0	0	66.500,00
Konstruksi dalam pengerjaan	15.653.000,00	0	15.653.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.420.691.588,09	773.338.843,61	326.498.432	7.867.531.999,70

Pada tahun 2022 terdapat mutasi aset sebagai berikut :

1. Pengadaan 16 set Rak Buku dan 16 set File Cabinet senilai Rp 91.694.880.
2. Pengadaan 8 set Tripod, 8 set Projector, dan 6 set Hanging White Board senilai Rp 76.061.000.
3. Pengadaan 20 set Kursi, 24 set Meja, dan 100 set Kursi Rapat senilai Rp 80.159.760. dan BOP senilai Rp 600.000 ( 20 set Kursi dan 100 set Kursi direklas ke Ekstrakomptabel karena nilai satuan barang kurang dari Rp 500.000 ).
4. Pengadaan 4 buah kipas angin senilai Rp 1.620.000 ( direklas ke Ekstrakomptabel karena nilai satuan barang kurang dari Rp 500.000 ).
5. Pengadaan 16 set Meja senilai Rp 39.072.000.
6. Pengadaan 16 set Kursi senilai Rp 15.326.880.
7. Dropping dari Dinpusip Scanner senilai Rp 4.230.000.



8. Reklasifikasi Peralatan dan Mesin yang senilai di bawah Rp 500.000 per barang direklas ke Ekstrakomptabel senilai Rp 366.782.632.
9. Mutasi Kendaraan Station Wagon Kijang KF50 ke Sekda senilai Rp 26.600.000.
10. Belanja Modal Gedung Balai Penyuluh KB kecamatan Bulu senilai Rp 553.491.154.
11. BOP terdiri dari Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa senilai Rp 4.175.000, Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural senilai Rp 19.624.000 dan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung senilai Rp 13.090.000.
12. Reklas dari KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan DED Balai Penyuluh KB Kecamatan Bulu senilai Rp 15.653.000.
13. Reklas ke Gedung dan Bangunan DED Balai Penyuluh KB Kecamatan Bulu senilai Rp 15.653.000.

Total kenaikan nilai aset tahun 2022 sebesar Rp 914.797.674 yang menambah aset peralatan dan mesin berasal dari belanja alat kantor dan rumah tangga sejumlah Rp 308.764.520 serta Gedung dan bangunan sebesar Rp 606.033.154.

### **ASET LAINNYA**

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah terdiri dari saldo aset tidak berwujud, aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lainnya, dengan rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
5	ASET LAINNYA	1.837.500,00	0
1503	Aset Tidak Berwujud	59.893.640,00	57.793.640,00
1504	Aset Lain-lain	0	0
1505	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	58.056.140,00	57.793.640,00
1506	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0

### 3.1.5. Kewajiban

Kewajiban atau Utang adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (Kewajiban Lancar) dan Kewajiban Jangka Panjang.

- Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga, yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Kewajiban Jangka Pendek meliputi Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga), Hutang Bunga dll.

- Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi.

Nilai kewajiban per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2022	2021
2	KEWAJIBAN	146.314.875,00	130.677.330,00
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	146.314.875,00	130.677.330,00
2101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
210105	Utang PPh Pusat	0,00	0,00
210106	Utang PPN Pusat	0,00	0,00
210109	Utang Pajak Daerah Katering	0,00	0,00
2106	Utang Belanja	146.314.875,00	130.677.330,00
210601	Utang Belanja Pegawai	98.239.514,00	91.315.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	48.075.361,00	39.362.330,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	146.314.875,00	130.677.330,00

Nilai kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp 146.314.875,00 terdiri dari utang PFK sebesar Rp 0 dan utang Belanja sebesar Rp 146.314.875,00

- Hutang PFK (Hutang Pada Pihak Ketiga)

Hutang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp 0

- Utang Belanja

Kode Rekening	Nama Rekening	2022	2021
2106	Utang Belanja	146.314.875,00	130.677.330,00
210601	Utang Belanja Pegawai	98.239.514,00	91.315.000,00
210602	Utang Belanja Barang dan Jasa	48.075.361,00	39.362.330,00
JUMLAH KEWAJIBAN		146.314.875,00	130.677.330,00

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp 146.314.875,00 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 98.239.514,00 dan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 48.075.361,00.

Utang Belanja Pegawai sebesar Rp 98.239.514,00 merupakan utang Tambahan Penghasilan Pegawai bulan Desember 2022 sedangkan Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 48.075.361,00 yang terdiri dari utang belanja jasa kantor sebesar Rp 7.450.361 dan utang belanja honor Pegawai Tidak Tetap bulan Desember 2022 sebesar Rp 40.625.000.

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

<b>Kode Rekening</b>	<b>Nama Rekening</b>	<b>Jumlah</b>
<b>210601</b>	<b>Utang Belanja Pegawai</b>	<b>98.239.514,00</b>
210601020001	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	98.239.514,00
210601020009	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00
<b>210602</b>	<b>Utang Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>48.075.361,00</b>
210602020017	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	31.600.000,00
210602020026	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Administrasi	9.025.000,00
210602020059	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	46.789,00
210602020060	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	362.950,00
210602020061	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	1.116.942,00
210602020063	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.923.680,00

### 3.1.6. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana merupakan jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah kewajiban/hutang pemerintah daerah. Struktur dan Isi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: Ekuitas awal, Ekuitas akhir, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan

kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

- koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
- perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 dapat diuraikan dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Nama Rekening	2022	2021
3	EKUITAS	8.860.238.315,00	8.950.728.755,61
31	EKUITAS	8.860.238.315,00	8.950.728.755,61
3101	Ekuitas	7.941.090.420,61	8.950.728.755,61
310101	Ekuitas	7.941.090.420,61	8.950.728.755,61
3103	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	10.850.072.403,00	0,00
310301	RK PPKD	10.850.072.403,00	0,00
	JUMLAH EKUITAS	8.860.238.315,00	8.950.728.755,61

3.2. Pengungkapan atas Pos-Pos yang Timbul sehubungan dengan Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan, Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis AkruaI pada SKPD

Kode Rekening	Nama Rekening	Jumlah pada LRA	Jumlah pada LO	Selisih
510102010001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	503.656.404	565.675.918	-62.019.514
510102050001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	756.249.602	701.154.602	55.095.000

51020201 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	384.000.000	390.450.000	-6.450.000
51020201 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	1.253.900.000	1.255.525.000	-1.625.000
51020201 0059	Belanja Tagihan Telepon	933.952	904.121	29.831
51020201 0060	Belanja Tagihan Air	2.742.000	2.893.750	-151.750
51020201 0061	Belanja Tagihan Listrik	20.864.839	20.840.421	24.418
51020201 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	70.092.090	70.632.620	-540.530

Pada pos Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS, Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Jasa Tenaga Administrasi, Tagihan Telepon, Tagihan Air, Tagihan Listrik, Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih antara LRA dan LO. Pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS terdapat selisih sebesar -Rp 62.019.514, pada Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS terdapat selisih sebesar Rp 55.095.000, pada Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat terdapat selisih sebesar -Rp 6.450.000, pada Belanja Jasa Tenaga Administrasi terdapat selisih sebesar -Rp 1.625.000, pada Belanja Tagihan Telepon terdapat selisih sebesar Rp 29.831, pada Belanja Tagihan Air terdapat selisih sebesar -Rp 151.750, pada Belanja Tagihan Listrik terdapat selisih sebesar Rp 24.418, pada Belanja Tagihan Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan terdapat selisih sebesar Rp 540.530. Total selisih adalah

sebesar Rp 15.637.545,00 Selisih tersebut karena adanya perbedaan jumlah utang awal tahun 2022 yaitu sebesar Rp 130.677.330,00 dan utang akhir tahun 2022 sebesar Rp 146.314.875,00.

## **BAB IV**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN SKPD**

#### **4.1 Data Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas tertentu dalam rangka mendukung tugas-tugas Pemerintah Daerah. Dasar Hukum berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kabupaten Temanggung adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 56 Tahun 2020, tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah dan Kabupaten Temanggung.

. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 130.

#### **4.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris
  - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
  - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



- 3) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Kepala Seksi Pengarustamaan Gender dan Perlindungan Perempuan
  - b. Kepala Seksi Perlindungan dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
- 4) Kepala Bidang pengendalian Penduduk dan peningkatan keluarga sejahtera
  - a. Kepala Seksi Perencanaan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk
  - b. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga dan Keluarga Sejahtera
- 5) Kepala Bidang Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana
  - a. Kepala Seksi advokasi dan KIE Program KKBPK
  - b. Kepala Seksi pelayanan Keluarga Berencana
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional

#### **4.3 Mutasi Pegawai**

Pada tahun 2022 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Temanggung mengalami beberapa kali momen pergantian dan purna tugas pejabat struktural pada bulan Februari, Juli, Agustus, dan November 2022.

## **BAB V PENUTUP**

Catatan Atas Laporan Keuangan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan mengingat banyak informasi yang tidak dapat diungkapkan di LRA dan neraca, keberadaan CaLK ini membantu *stakeholders* untuk memahami laporan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban menyajikan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting mengingat beragamnya latar belakang pendidikan para pengguna laporan yang kebanyakan tidak terlalu akrab dengan struktur laporan keuangan. Laporan Keuangan yang sulit dipahami berpotensi menimbulkan berbagai macam salah penafsiran di antara para pembacanya.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan DPPPAPPKB Kabupaten Temanggung TA 2022. Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan dapat dikonsolidasi dengan laporan keuangan OPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 20 Januari 2023

Kepala DPPPAPPKB  
Kabupaten Temanggung

**Dra. SRI ENDANG PRAPTANINGSIH, M.Si.**  
**NIP. 19660712 199403 2 006**

